

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 4, Mei 2023

e-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978434>

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Etika Kepemimpinan Yang Berkarakter dan Bertanggung Jawab

Dina Andini Nur An-Nisa¹, Rosi Lantika², Reza Natasha³, Thifal Aulia⁴

¹²³⁴Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi
e-mail: 223401001@student.unsil.ac.id¹, 223401011@student.unsil.ac.id²,
223401015@student.unsil.ac.id³, 223401032@student.unsil.ac.id⁴

Abstrak

Peran pendidikan kewarganegaraan bagi para calon pemimpin khususnya pelajar saat ini hanya sekedar teoretis, sehingga dalam hal ini masih terdapat kurangnya pembentukan etika kepemimpinan secara praktik, juga teori-teori dalam pendidikan kewarganegaraan dengan mudah diabaikan karena tidak secara nyata dibuktikan dalam pembelajaran. Dengan begitu diperlukan peran dari pendidikan kewarganegaraan yang cukup penting untuk membentuk etika kepemimpinan yang dijabarkan secara teori menjadi tersimpan secara nyata dalam praktiknya. Selain itu juga dengan adanya peran pendidikan kewarganegaraan ini akan mempermudah dalam pembentukan etika, sehingga proses penanaman moralitas karakter dan tanggung jawab menjadi lebih efisien. Metode yang digunakan dalam pembentukan etika kepemimpinan yang berkarakter dan bertanggung jawab memakai pendekatan kualitatif dengan mengimplementasikan paradigma kritis. Yang mendapatkan hasil penelitian berupa sebuah alat analisis yang dapat dipakai untuk para pelajar sehingga memudahkan proses pembentukan nilai berkarakter dan bertanggung jawab dari teori pendidikan kewarganegaraan, serta pembentukan etika kepemimpinan menjadi pribadi yang lebih praktikal. Sehingga mendapati kesimpulan bahwa pada saat ini peran pendidikan kewarganegaraan masih dilakukan dengan cara pembelajaran yang terkungkung oleh teori, yang dimana cara tersebut masih terdapat risiko terjadinya kejenuhan, dengan begitu maka dibutuhkan sebuah alat analisis yang dapat mengatasi hal tersebut, yang diharapkan akan menekan risiko yang ada, sehingga proses pembentukan etika kepemimpinan yang berkarakter dan bertanggung jawab akan menjadi sebuah komitmen yang nyata.

Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan; Etika; Metode Kualitatif; Paradigma Kritis

Abstract

The role of civic education for prospective leaders, especially students, is currently only theoretical, so in this case there is still a lack of practical formation of leadership ethics, as well as theories in civic education are easily ignored because they are not actually proven in learning. That way the role of civic education is quite important to shape the leadership ethics described in theory to be stored in practice. In addition, the role of civic education will facilitate the formation of ethics, so that the process of instilling character morality and responsibility becomes more efficient. The method used in shaping the ethics of leadership with character and responsibility uses a qualitative approach by implementing a critical paradigm. The research results in the form of an analytical tool that can be used for students to facilitate the process of forming values of character and responsibility from the theory of civic education, as well as the formation of leadership ethics into a more practical person. So that it can be concluded that at this time the role of civic education is still carried out in a way of learning that is confined by theory, in which way there is still a risk of saturation, so an analytical tool is needed that can overcome this, which is expected to reduce the existing risks, so that the process of forming leadership ethics with character and responsibility will become a real commitment.

Keywords: Civic Education; Ethics; Qualitative Method; Critical Paradigm

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah proses membentuk manusia yang dewasa secara akal, sikap, dan perilaku. Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat vital terhadap pembentukan karakter dan tanggung jawab warga negara (civics) melalui pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi (BSNP, 2006: 108)[1]. Dan juga, Pendidikan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran wajib bagi berbagai kalangan pelajar misalnya, mulai dari Sekolah Dasar (SD), (SMP), (SMA), bahkan di bangku perkuliahan di bidang manapun menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi[2]. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang tersebut mewajibkan perguruan tinggi untuk memberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kepada Mahasiswa.

Hal tersebut, menjadi sebuah tujuan bangsa untuk menjadikan sebuah bangsa yang unggul diperlukannya pembentukan karakter dan tanggung jawab secara cepat atau lambat. Pada ranah internasional, jika suatu negara memiliki warga negara yang mempunyai karakter unggul dan bertanggung jawab, maka negara kita mempunyai identitas nasional yang menjadi sebuah keistimewaan bangsa, sekaligus menjadi pembeda dengan negara yang lain, secara otomatis akan dihormati oleh berbagai bangsa. Akan tetapi, Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan menjadikan warga negara yang baik, itu berbeda-beda akan maknanya di tiap bangsa sebagaimana di Indonesia memiliki pedoman yakni, Pancasila sebagai sistem etikanya.

Dalam hubungannya, Pancasila sebagai sistem etika mempunyai hubungan-hubungan dengan nilai, norma, dan moral. Ketika nilai berbicara mengenai kategori mengenai tinggi dan rendahnya sifat suatu benda yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Melainkan ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu (Kaderi, 2015: 137)[3]. Dan juga, menurut (Lacey, 1999: 23) memaparkan ada enam pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang bersifat fundamental yang dicari manusia sepanjang hidupnya;
- b. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemaknaan dalam pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang;
- c. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai hasil evaluasi diri, pemberian kesan, dan pembentukan diri.
- d. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan.
- e. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertindak laku bagi dirinya dan orang lain.
- f. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Sebagai objeknya, mencakup seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disakralkan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri.

Sementara itu, norma berbicara tentang wujud nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. Norma-norma ini mengatur segala sesuatu kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Menurut (Kaelan, 2016)[4] norma diklasifikasi menjadi:

- a. Norma susila (kesusilaan), yaitu peraturan yang bermuara dari hati nurani manusia tentang penentuan segala tindakan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila ini bisa mendorong etika kepemimpinan yang berbasiskan kebaikan akhlak pribadinya.

- b. Norma kesopanan, yaitu suatu asas yang muncul dengan sendirinya dari proses interaksi sosial di dalam masyarakat. Asasnya adalah kebiasaan yang dianut di suatu masyarakat dan diyakini di dalam masyarakat secara turun-temurun.
- c. Norma agama, yaitu tatanan hidup yang diatur langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi ajaran, perintah, dan larangan yang berasal dari wahyu yang diturunkan kepada orang terpilih yakni, para rasul dan disebarkan kepada semua orang dan mempunyai nilai fundamental yang menghiasi berbagai norma yang lain.
- d. Norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang dan bersifat imperatif atau memaksa dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Adapun, pengertian moral dari perspektif bahasa latin adalah *mos* yang berarti tata cara, adat istiadat, atau kebiasaan, sedangkan jamaknya *mores*. Dalam arti adat istiadat dan kebiasaan, kata moral merujuk pada zaman yunani kuno, yakni *ethos* berarti etika. Dan juga, memiliki arti yang sama dengan budi pekerti menurut bahasa arab dan memiliki makna yang sama juga dengan akhlak yang berkaitan dengan pesan, pelajaran, nilai, atau makna yang menghasilkan nilai yang terkait dengan baik dan buruk itu bersifat relatif atau mutlak. Menurut (Staddon.J, 1999)[5] mengemukakan moral itu dibagi tiga, yakni:

- a. *Science of belong* (merasa memiliki);
- b. *Science of laws* (hukum);
- c. *Science responbility* (bertanggung jawab).

Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa hubungan antara nilai, norma, dan moral, akan membentuk manusia sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hubungan nilai, norma dan moral

Dari Gambar 1. dapat diketahui bahwa nilai dalam filsafat dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*), atau kebaikan (*goodness*). Semua nilai harus diinternalisasi kedalam norma (ukuran aturan) dan melalui (*judgment*) moral, etika terwujud menjadi tindakan manusia yang mengandung konsekuensi moral.

Etika adalah adat yang menjadi sebuah kebiasaan untuk mengatur akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir (Van Ness, 2010: 14)[6]. Secara umum, etika merupakan suatu disiplin ilmu mengenai apa yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (KBBi Edisi V, 2023)[7]. Dalam etika, membahas berbagai pandangan mengenai moral yang diprakarsai oleh pemikiran-pemikiran filsuf yang kritis.

Dari uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter kepemimpinan yang berkarakter dan bertanggung jawab, dikarenakan menurut pengamatan penulis berdasarkan sumber bacaan yang telah ditelusuri penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai pembentukan etika kepemimpinan yang berkarakter dan bertanggung jawab oleh peran pendidikan kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Tahap Penelitian

Alur metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka penelitian yang mengimplementasikan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari berbagai media offline (buku) maupun media mainstream sebagai tambahan serta kajian pustaka dan jurnal. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4)[8] memiliki suatu pernyataan bahwa “memiliki prosedural penelitian yang deskriptif dari retorika tertulis.

Kemudian, Moleong (2004: 10-13)[9] memaparkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: pendahuluan atau latar bersifat ilmiah, manusia dijadikan sarana penelitian, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk mengumpulkan data, dan dianalisis secara induktif dan deskriptif, menyusun teori dari bawah ke atas (grounded theory), lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Alur penelitian bisa dilihat pada Gambar 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, kami membahas secara singkat tiga teori kepemimpinan yang berkaitan dengan etika kepemimpinan yang berkarakter, yakni Teori kepemimpinan transformasional, spiritual, pancasila, dan autentik semuanya membahas potensi moral kepemimpinan dalam beberapa cara. Selanjutnya, Burns (1978)[10] mengusulkan bahwa:

1. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan moral karena pemimpin transformasional mengilhami pengikut mereka untuk melihat melampaui kepentingan diri sendiri dan bekerja sama untuk tujuan kolektif. Namun, karya ini memicu perdebatan tentang etika kepemimpinan transformasional dan karismatik dengan para sarjana yang mempertimbangkan kedua sisi masalah tersebut. Kanungo & Mendonca (1996)[11] berpendapat bahwa kepemimpinan transformasional melibatkan proses pengaruh etis, sedangkan kepemimpinan transaksional tidak. Tapi, Bass (1985)[12] berpendapat bahwa pemimpin transformasional bisa etis atau tidak etis tergantung pada motivasi mereka. Bass & Steidlmeier (1999)[13] mengambil posisi ini lebih jauh dengan membedakan antara pemimpin transformasional otentik dan palsu. Para penulis ini menyatakan bahwa pemimpin transformasional otentik adalah pemimpin moral karena legitimasi nilai-nilai moral pemimpin (misalnya, kejujuran, keadilan), motivasi sosial pemimpin, dan menghindari paksaan dan pengaruh manipulatif. Di sisi lain, pemimpin transformasional semu lebih mementingkan diri sendiri dan bermotivasi politik. Howell (1988)[14] membuat perbedaan serupa antara kepemimpinan karismatik yang dipersonalisasi dan yang disosialisasikan, dengan pemimpin karismatik yang disosialisasikan menjadi lebih etis di antara keduanya. Howell & Avolio (1992)[15] mendukung perbedaan tersebut dalam studi kualitatif.

2. Kepemimpinan autentik

Pemimpin autentik adalah “individu yang sangat menyadari bagaimana mereka berpikir dan berperilaku dan dianggap oleh orang lain sebagai sadar akan nilai/perspektif moral, pengetahuan, dan kekuatan mereka sendiri dan orang lain; menyadari konteks di mana mereka beroperasi; dan yang percaya diri, penuh harapan, optimis, ulet, dan bermoral tinggi” (Avolio, Luthans, & Walumbwa, 2004, p. 4)[16]. Luthans & Avolio (2003, p. 4)[17] memandang kepemimpinan autentik sebagai “konstruk akar” yang “dapat menggabungkan

kepemimpinan karismatik, transformasional, integritas, dan/atau etis". Tapi, mereka juga berpendapat bahwa konstruksi ini berbeda satu sama lain. Bass & Avolio (2000)[18] melalui Multi-Factor Leadership Questionnaire (Bass & Avolio, 2000)[19], memang menggambarkan seorang pemimpin dengan orientasi etis. Misalnya, Turner, Barling, Epitropaki, Butcher, & Milner (2002)[20] menemukan bahwa bawahan menganggap pemimpin dengan penalaran moral yang lebih tinggi lebih transformasional.

Selanjutnya, kepemimpinan transformasional telah ditemukan berhubungan positif dengan persepsi integritas pemimpin (Parry & Proctor-Thomson, 2002; Tracey & Hinkin, 1994)[21]. Kesadaran diri, keterbukaan, transparansi, dan konsistensi adalah inti dari kepemimpinan otentik. Selain itu, dimotivasi oleh nilai-nilai akhir yang positif dan kepedulian terhadap orang lain (bukan oleh kepentingan pribadi) sangat penting untuk kepemimpinan yang otentik. Pemimpin sejati mencontohkan atribut positif seperti harapan, optimisme, dan ketahanan. Akhirnya, pemimpin otentik mampu menilai masalah etika yang ambigu, melihatnya dari berbagai perspektif, dan menyelaraskan keputusan dengan nilai moral mereka sendiri.

3. Kepemimpinan rohani

Kepemimpinan rohani terdiri dari "nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain secara intrinsik sehingga mereka memiliki rasa kelangsungan hidup spiritual melalui panggilan dan keanggotaan" (Fry, 2003, hal. 711)[22] dan "inklusif pendekatan berbasis agama dan etika dan nilai-nilai untuk kepemimpinan". Alternatifnya, kepemimpinan spiritual juga digambarkan sebagai "terjadi ketika seseorang dalam posisi kepemimpinan mewujudkan nilai-nilai spiritual seperti integritas, kejujuran, dan kerendahan hati, menciptakan diri sebagai contoh seseorang yang dapat dipercaya, diandalkan, dan dikagumi. Kepemimpinan rohani juga ditunjukkan melalui perilaku, baik dalam praktik reflektif individu atau dalam perlakuan etis, penuh kasih, dan hormat terhadap orang lain" (Reave, 2005, hlm. 663)[23]. Kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan etis tumpang tindih dalam fokus mereka pada karakteristik pribadi. Pemimpin etis dan transformasional peduli dengan orang lain, bertindak konsisten dengan prinsip moral mereka (yaitu integritas), mempertimbangkan konsekuensi etis dari keputusan mereka, dan menjadi panutan etis bagi orang lain. Di sisi lain, teori dan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan etis dan kepemimpinan transformasional juga merupakan konstruksi yang berbeda (Brown et al., 2005; Treviño et al., 2003)[24].

Kepemimpinan etis telah ditemukan secara signifikan berkorelasi dengan dimensi pengaruh ideal kepemimpinan transformasional (dimensi yang memiliki konten etis eksplisit) (Brown et al., 2005). Tapi, seperti yang disarankan sebelumnya, kepemimpinan etis juga meramalkan sejumlah hasil di luar pengaruh pengaruh ideal (Brown et al., 2005). Ini mungkin karena aspek manajemen moral kepemimpinan etis lebih konsisten dengan apa yang sering kita anggap sebagai gaya transaksional daripada gaya kepemimpinan transformasional. Sebagai contoh, pemimpin etis mencoba mempengaruhi perilaku etis pengikut dengan secara eksplisit menetapkan standar etika dan meminta pertanggungjawaban pengikut terhadap standar tersebut dengan menggunakan penghargaan dan disiplin.

Jadi, kepemimpinan etis sebagaimana didefinisikan di sini mencakup proses pengaruh transaksional yang membedakannya dari kepemimpinan transformasional. Selain itu, konstruk kepemimpinan etis tidak memasukkan referensi ke kepemimpinan visioner atau merangsang secara intelektual, istilah yang konsisten dengan gaya kepemimpinan transformasional/karismatik. Instrumen yang dirancang untuk mengukur kepemimpinan spiritual (Fry, Vitucci, & Cedillo, 2005)[25] mewakili tiga dimensi: a) visi, yang menggambarkan visi dan identitas organisasi, b) harapan/iman, yang mencerminkan keyakinan bahwa visi tersebut akan terwujud, dan c) cinta altruistik yang dihasilkan dari lingkungan kerja yang peduli.

Penekanan kepemimpinan rohani pada integritas, altruisme dan gaya kepemimpinan pertimbangan konsisten dengan konseptualisasi sebelumnya dari dimensi etika kepemimpinan, serta konsisten dengan kepemimpinan transformasional dan otentik. Namun, konstruk dan instrumen kepemimpinan spiritual juga mengandung konten yang tidak terkait dengan kepemimpinan etis. Misalnya, mirip dengan kepemimpinan transformasional, pemimpin spiritual dianggap visioner, karakteristik yang tidak terkait dengan kepemimpinan etis. Selanjutnya, pemimpin rohani dianggap dimotivasi oleh pelayanan kepada Tuhan atau kemanusiaan dan mereka memandang pekerjaan kepemimpinan mereka sebagai "panggilan".

Meskipun motif spiritual semacam itu mungkin memengaruhi seseorang untuk menjadi pemimpin etis, pemimpin etis mungkin juga didorong oleh perhatian yang lebih pragmatis. Mereka memahami bahwa mereka dapat dan harus memengaruhi perilaku etis pengikut dan, untuk melakukannya, mereka menggunakan mekanisme pengaruh yang sering dikaitkan dengan gaya kepemimpinan transaksional.

4. Kepemimpinan Pancasila

Sementara itu, gaya kepemimpinan pancasila berangkat dari hasil pemikiran atau filsafat etika pancasila yang dijabarkan melalui sila-silanya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, etika Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila tersebut membentuk karakter jati diri bangsa dan berperilaku yang bertanggung jawab kepada tuhan (sila ke 1), kepada sesama manusia (*humanus*) (sila ke 2), bertanggung jawab kepada negara dan bangsa kebersamaan untuk mencintai tanah air (*mitsein*) (sila ke 3), bertanggung jawab mendengarkan suara rakyat dan tidak memaksakan egosentrisme pribadi (sila ke 4), bertanggung jawab kepada nasib seluruh masyarakat kedepan dan peduli atas kesulitan orang lain (Dikti, 2016:180)[26].

Kesemuanya itu memperlihatkan urgensinya kedudukan pancasila sebagai sistem etika kepemimpinan yang berkarakter dan bertanggung jawab melalui pendidikan kewarganegaraan ini kita bisa mengenal sistem etika pancasila yang menjadi tuntunan atau sebagai *leading principle* bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila (Dikti, 2016: 181-182)

Hasil dari peran pendidikan kewarganegaraan itu bisa dilakukan dengan cara memasukkan nilai, norma, dan moralitas yang ada dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan dihadapkan dengan adanya materi wawasan nusantara agar lebih mengenal negaranya dan peduli terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dan hal tersebut tidak diperbolehkan untuk apatis dan pesimis terhadap politik khususnya dalam hal ini pemilu karena hal tersebut menunjukkan kemerosotan moral kita sebagai warga negara yakni, berbudaya politik parokial dan memilih golput.

Seharusnya, kita sebagai warga negara harus mengimplementasikan wawasan nusantara ini dengan memilih berpartisipasi dalam politik ikut dalam pemilu presiden, DPR, dan DPD. Dan hal tersebut, menunjukkan suatu bangsa memiliki tingkat kepedulian terhadap politik dan demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan kita, yang mana itu merupakan suatu keluar dari dominasi kelompok agar tidak peduli terhadap politik. Akan tetapi, dengan wawasan nusantara kita harus keluar dari zona nyaman dan berbudaya partisipan untuk kemaslahatan bangsa dan menyehatkan dalam demokrasi lewat pemilu dan secara otomatis memiliki wawasan nusantara yang kuat.

Dan menurut pengamatan penulis, diharuskan peka terhadap fenomena sosial dan menganalisis sebuah fenomena yang terjadi pada pemilu dengan menggunakan pendekatan filsafat etika pancasila. Sekarang, nama-nama para bakal calon kandidat peserta pilpres telah berseliweran di media. Kemudian, silahkan anda menilai dengan kaca mata etika kepemimpinan transformasional, autentik, rohani, atau pancasila?, apakah nama-nama tersebut lulus dan layak sebagai kepemimpinan etis?. Sehingga layak untuk memimpin

bangsa ini yang berwawasan nusantara dan peduli hukum (*Science of laws*), dan merasa memiliki karakter kepedulian (*Science of belong*) terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia.

KESIMPULAN

Adapun peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembentuk etika kepemimpinan yang berkarakter dan bertanggung jawab memang menjadi tujuan utama bangsa ini. Dengan adanya tulisan ini diharapkan warga negara dapat tercerahkan dan tersadarkan setelah tahu mengenai pendidikan kewarganegaraan secara teoretis, kemudian dipahami, dan diaplikasikan di kehidupan bermasyarakat baik dari skala diri pribadi, keluarga, bahkan tingkat elite negara. Namun, dalam mengaplikasikan sebuah teori ini, juga masih terdapat kurangnya kritis dalam melihat fenomena di lapangan. Maka dari itu, diharuskan menganalisis sebuah fenomena sosial, kemudian mensintesis menjadi sebuah kesatuan yang selaras dengan karakter kita. Dan yang terakhir, berilah sebuah evaluasi terhadap apa yang sudah dijabarkan sebelumnya untuk meningkatkan rasa tanggung jawab (*science responsibility*).

Referensi

- [1] Lt, G. D., & Fatmawati, M. J. R. (2006). Badan Standar Nasional Pendidikan.
- [2] INDONESIA, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- [3] Kaelan, M. S. (2006). Perkembangan Filsafat Analitika Bahasa dan Pengaruhnya terhadap Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Paramadina.
- [4] Staddon, J. (1999). On responsibility in science and law. *Social Philosophy and Policy*, 16(2), 146-174.
- [5] Staddon, J. (1999). On responsibility in science and law. *Social Philosophy and Policy*, 16(2), 146-174.
- [6] Van Ness, R. K., Melinsky, K., Buff, C. L., & Seifert, C. F. (2010). Work ethic: Do new employees mean new work values?. *Journal of Managerial Issues*, 10-34.
- [7] (KBBI Edisi V, 2023). Pengertian Etika
- [8] Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (XXVII)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [9] Van Ness, R. K., Melinsky, K., Buff, C. L., & Seifert, C. F. (2010). Work ethic: Do new employees mean new work values?. *Journal of Managerial Issues*, 10-34.
- [10] Loftus, E. F., Miller, D. G., & Burns, H. J. (1978). Semantic integration of verbal information into a visual memory. *Journal of experimental psychology: Human learning and memory*, 4(1), 19.
- [11] Conger, J. A., Kanungo, R. N., & Menon, S. T. (2000). Charismatic leadership and follower effects. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 21(7), 747-767.
- [12] Seltzer, J., & Bass, B. M. (1990). Transformational leadership: Beyond initiation and consideration. *Journal of management*, 16(4), 693-703.
- [13] Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. *The leadership quarterly*, 10(2), 181-217.
- [14] Howell, D. C. (2012). *Statistical methods for psychology*. Cengage Learning.
- [15] Howell, J. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership, transactional leadership, locus of control, and support for innovation: Key predictors of consolidated-business-unit performance. *Journal of applied psychology*, 78(6), 891.

- [16] Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. *The leadership quarterly*, 15(6), 801-823.
- [17] Luthans, F., & Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership development. *Positive organizational scholarship*, 241(258), 1-26.
- [18] Avolio, B. J., Bass, B. M., & Jung, D. I. (1999). Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership. *Journal of occupational and organizational psychology*, 72(4), 441-462.
- [19] Stewart, J. (2006). Transformational leadership: An evolving concept examined through the works of Burns, Bass, Avolio, and Leithwood. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, (54).
- [20] Turner, N., Barling, J., Epitropaki, O., Butcher, V., & Milner, C. (2002). Transformational leadership and moral reasoning. *Journal of applied Psychology*, 87(2), 304.
- [21] Parry, K. W., & Proctor-Thomson, S. B. (2002). Perceived integrity of transformational leaders in organisational settings. *Journal of business ethics*, 35, 75-96.
- [22] Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. *The leadership quarterly*, 14(6), 693-727.
- [23] Reave, L. (2005). Spiritual values and practices related to leadership effectiveness. *The leadership quarterly*, 16(5), 655-687.
- [24] Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. *The leadership quarterly*, 17(6), 595-616.
- [25] Fry, L. W., Vitucci, S., & Cedillo, M. (2005). Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline. *The leadership quarterly*, 16(5), 835-862.
- [26] Lt, G. D., & Fatmawati, M. J. R. (2006). *Badan Standar Nasional Pendidikan*.